

Determinan Sosial Ekonomi Kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Tenaga Kerja Informal di Indonesia: Analisis Data SUSENAS 2017

The Socio-Economic Determinants of Employment Accident Insurance Ownership for Informal Workers in Indonesia: Analysis of Susenas 2017

Sri Denti On Madya¹, Atik Nurwahyuni²

¹Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia,

²Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Korespondensi: Sri Denti On Madya

e-mail: onmadya@yahoo.com/081513688617

Abstrak

Jumlah tenaga kerja informal lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja formal di Indonesia. Cakupan kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih sangat rendah sedangkan angka kecelakaan kerja masih cenderung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosial ekonomi kepemilikan jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja informal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan analisis bivariat dengan metode *maximum likelihood* dengan model logit. Data yang digunakan adalah Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 diolah menggunakan stata dengan uji regresi logistik/logit serta dianalisis dengan pendekatan model ekonometri. Variabel yang diamati yaitu, umur, jenis kelamin, status pernikahan, keluhan kesehatan, pendidikan, wilayah dan sosial ekonomi/pendapatan tenaga kerja informal. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara wilayah ($p=0,0005$), umur ($p=0,0005$), jenis kelamin ($p=0,0005$), status pernikahan ($p=0,001$), pendidikan ($p=0,0005$), dan sosial ekonomi/pendapatan ($p=0,0005$) tenaga kerja informal terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia. Dengan model ekonometri diketahui faktor yang paling berpengaruh terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja sektor informal yaitu karakteristik tenaga kerja informal terdiri dari pendidikan (OR 1,94), Umur (OR 1,09), wilayah (OR 1,71) dan pendapatan (OR 1,79). Kata kunci : Sektor informal, Jaminan Kecelakaan kerja, Logit, Ekonomi

Abstract

The number of informal workers is higher than the formal workforce in Indonesia. The coverage of working accident protection is still very low while the work accident rate still tends to be high. This study aims to determine the socio-economic determinants of employment accident insurance ownership in informal workers in Indonesia. This study used a cross sectional study design with bivariate analysis using the estimation method of maximum likelihood. The Susenas Data (National Socio-Economic Survey) in 2017 is analyzed using logistic/logit regression. The variables observed were age, sex, marital status, health, education, regional complaints, and socio-economic/informal labor income. The results of the study indicated a relationship between region ($p=0,0005$), age ($p=0,0005$), sex ($p=0,0005$), marital status ($p=0,001$), education ($p=0,0005$), and socio-economic/income ($p=0,0005$) in informal labor on employment accident insurance ownership in Indonesia. The econometric model show that the factors that most influence the ownership of work accident insurance in the informal sector workforce are informal labor characteristics consisting of education (OR 1.94), Age (OR 1.09), region (OR 1.71), and income (OR 1.79).

Keywords : Informal sector, Logit, employment accident insurance, Economic

Pendahuluan

Sektor pekerjaan informal telah dikenal sebagai sebuah fenomena alami dibanyak negara berkembang. Keterlibatan di dalam ekonomi, sektor pekerjaan informal juga diasosiasikan dengan upah yang lebih rendah, pekerjaan yang lebih sulit dan berbahaya, keamanan dan perlindungan yang lebih rendah serta banyak kerugian lainnya. Dengan kata lain, ekonomi informal mewakili sebuah kerja yang tidak layak tetapi di sisi lain ekonomi informal adalah sumber mata pencaharian dan perlindungan segera dari kemiskinan. Sektor informal menawarkan

solusi tepat terhadap kebutuhan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan (Taufiq, 2017).

Pada 2013, satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami penyakit akibat kerja. Penelitian Duric, et.al (2018) di Serbia menyebutkan bahwa kecelakaan adalah penyebab kematian nomor lima dan cedera pada pekerja sektor informal. Di Indonesia, jumlah kasus kecelakaan akibat kerja pada tahun 2011-2014 yaitu 9.891 orang (tahun 2011), 21.735 (tahun 2012), 35.917 (tahun

2013) dan 24.910 (tahun 2014) (Kemenkes, 2015). Berdasarkan laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 123.040 kecelakaan kerja pada tahun 2017 (BPJS Ketenagakerjaan, 2017).

Jaminan sosial telah diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu”. Selain itu untuk jaminan sosial sektor informal diatur dalam pasal 28 H ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. *Declaration of human right* pasal 25 juga menyebutkan, “setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninggal dunia.” Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja luar hubungan kerja, pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain: kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia (Utama, 2015).

Berdasarkan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepesertaan sektor informal masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Menurut BPJS Ketenagakerjaan, pekerja BPU ini adalah mereka yang memiliki pekerjaan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut. Pekerja BPU ini meliputi pemberi kerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima upah. Jaminan kecelakaan kerja sektor informal memberikan menjamin biaya perawatan medis dan rehabilitasi bagi pekerja yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015.

Undang-undang mengamanatkan bahwa Jaminan ketenagakerjaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebutkan jumlah pekerja di sektor informal meningkat pesat pada Februari 2017, yaitu mencapai 58,35 persen (131,55 juta orang) dibandingkan sektor formal yang hanya 41,65 persen (124,54 juta orang). Namun tidak semua dari mereka memiliki bahkan tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan dan santunan berupa uang.

Menurut ILO hanya satu dari lima orang di dunia memiliki jaminan sosial yang memadai, dengan separuh penduduk dunia tidak memiliki cakupan jaminan sosial dalam bentuk apapun. Di Indonesia, jumlah peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bukan Penerima Upah (BPU) pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.714.169 orang dari 63 juta orang yang berkeja di sektor informal (BPJS Ketenagakerjaan, 2017).

Negara Cina yang mengalami peningkatan jumlah kecelakaan kerja sejak tahun 2004 dan akhirnya membuat peraturan yang mengharuskan semua perusahaan memiliki asuransi kecelakaan kerja dan membayar kontribusi relevan, baik pekerja tetap dan pekerja partuh waktu yang terlibat dalam hubungan kerja berhak mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut (Darimont, 2005). Berbeda dengan di Zimbabwe (Afrika Selatan) hubungan antara asuransi kecelakaan kerja dan pencegahannya dengan skema kompensasi dianggap tidak menguntungkan dibandingkan dengan fokus terhadap pencegahan kecelakaan kerja itu sendiri (Kaseke, 2003).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 disebutkan bahwa jaminan kecelakaan kerja memberikan manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Tetapi masih banyak para pekerja khususnya di sektor informal yang tidak mengetahui manfaat dari jaminan sosial tersebut. Masalah mendasar lain adalah belum adanya kesadaran dan pemahaman yang memadai terhadap pentingnya manfaat program tersebut bagi kesejahteraan sosial. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui determinan sosial ekonomi tenaga kerja informal terhadap kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan analisis bivariat dengan pendekatan model ekonometri yaitu metode estimasi dengan *Maximum Likelihood*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 dengan mengambil umur, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, wilayah dan sosial ekonomi/pendapatan tenaga kerja informal sebagai variabel dalam penelitian ini.

Unit analisis yang digunakan adalah tenaga kerja informal dengan usia minimal 15 tahun sebanyak 298.910 orang yang bekerja pada sektor informal yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga atau tidak dibayar untuk menjadi kriteria inklusi dalam penelitian ini. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model logit dengan metode *Maximum Likelihood* (Gudjarati, 2010) dan diolah menggunakan Stata. Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \mu_i$$

Keterangan:

- Y = Kepemilikan JKK
 β_0 = Konstanta / intersep
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Parameter
 X_1 = Wilayah (1= Perkotaan; 0= Perdesaan)
 X_2 = Umur
 (1=15-25; 2= 26-45; 3= \geq 46)
 X_3 = Jenis Kelamin
 (1= Perempuan; 0= laki-laki)
 X_4 = Status Pernikahan
 (1=menikah; 0=belum menikah)
 X_5 = Keluhan kesehatan
 (1=ada keluhan; 0= tidak ada keluhan)
 X_6 = Pendidikan (1= tinggi; 0= rendah)
 X_7 = Pendapatan (1= sangat rendah; 2= rendah; 3=menengah; 4= tinggi; 5=sangat tinggi)
 μ_i = Error term

Hasil Penelitian

Analisi Univariat

Tabel 1. Distribusi Kepemilikan JKK Tenaga Kerja Informal di Indonesia

JKK	Tenaga Kerja Informal	%
Tidak Ada	293.174	98,08
Ada	5.736	1,92
Total	290.910	100,00

Tabel 2. Distribusi Sosio Demografi Tenaga Kerja Informal di Indonesia

Variabel	n	%
Wilayah		
Perdesaan	205.209	68,65

Perkotaan	93.701	31,35
-----------	--------	-------

Kelompok Umur

15 – 25 Thn	34.659	11,60
26 – 45 Thn	139.229	46,58
\geq 46 Thn	125.022	41,83

Jenis Kelamin

Laki-laki	178.754	59,80
Perempuan	120.156	40,20

Status Pernikahan

Belum menikah	39.099	13,08
Menikah	259.811	86,92

Keluhan Kesehatan

Tidak ada keluhan	212.510	71,09
Ada keluhan	86.400	28,91

Pendidikan

Rendah	221.261	74,02
Tinggi	77.649	25,98

Sosial Ekonomi/ Pendapatan

Sangat rendah	50.566	16,92
Rendah	53.455	17,88
Menengah	60.210	20,14
Tinggi	65.705	21,98
Sangat tinggi	68.974	23,08

Total	290.910	100,00
--------------	----------------	---------------

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebanyak 293.174 (98,08%) tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja dari total responden sebanyak 290.910 orang (Tabel 1). Tabel 2 menunjukkan sebagian besar tenaga kerja informal berada pada wilayah perdesaan yaitu sebesar 205.209 orang (68,65%), kelompok umur responden paling banyak terdapat pada kelompok umur 26-45 tahun yaitu sebanyak 139.229 orang (46,58%), jenis kelamin responden paling banyak laki-laki sebanyak 178.754 (59,80%), sebagian besar tenaga kerja informal berstatus sudah menikah yaitu sebanyak 259.811 (86,92%) dan sebanyak 212.510 orang (71,09%) tenaga kerja informal tidak memiliki keluhan kesehatan.

Jumlah responden dengan tingkat pendidikan rendah paling besar, yaitu sebanyak 221.261 (74,02%) sementara untuk sosial ekonomi/pendapatan responden hampir merata ada pada tiap kuintil.

Tabel 3 menjelaskan bahwa pada tahun 2017 kepemilikan jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,9%

Tabel 3. Distribusi Tenaga Kerja Informal Menurut Variabel Penelitian

Variabel	Mean	SD	Min	Max
Variabel Dependen				
Kepemilikan JKK	0,019	0,137	0	1
Variabel Independen				
Wilayah	0,313	0,464	0	1
Umur	2,302	0,665	1	3
Jenis Kelamin	0,598	0,490	0	1
Status Pernikahan	0,869	0,337	0	1
Keluhan kesehatan	0,289	0,453	0	1
Pendidikan	0,259	0,439	0	1
Sosial Ekonomi/Pendapatan	3,164	1,404	1	5

Tabel 4. Determinan Kepemilikan JKK pada Tenaga Kerja Informal di Indonesia

Kepemilikan JKK							
Variabel	Tidak ada JKK		Ada JKK		P value	TOTAL	
	n	%	n	%		n	%
Wilayah							
Perdesaan	202.590	98,72	2.619	1,28	0,000*	205.209	100
Perkotaan	90.584	96,67	3.117	3,33		93.701	100
Kelompok Umur							
15 – 25 Thn	34.030	98,19	629	1,81	0,000*	34.659	100
26 – 45 Thn	136.638	98,14	2.591	1,86		139.229	100
≥ 46 Thn	122.506	97,99	2.516	2,01		125.022	100
Jenis Kelamin							
Laki-laki	175.936	98,42	2.818	1,58	0,000*	178.754	100
Perempuan	117.238	97,57	2.918	2,43		120.156	100
Status Pernikahan							
Belum menikah	38.348	98,08	751	1,92	0,001*	39.099	100
Menikah	254.826	98,08	4.985	1,92		259.811	100
Keluhan Kesehatan							
Tidak ada keluhan	208.406	98,07	4.104	1,93	0,396	212.510	100
Ada keluhan	84.768	98,11	1.632	1,89		86.400	100
Pendidikan							
Rendah	218.326	98,67	2.935	1,33	0,000*	221.261	100
Tinggi	74.848	96,39	2.801	3,61		77.649	100
Sosial Ekonomi/ Pendapatan							
Sangat rendah (Kuintil 1)	50.331	99,54	235	0,46	0,000*	50.566	100
Rendah (Kuintil 2)	53,086	99,31	369	0,69		53,455	100
Menengah (Kuintil 3)	59.339	98,55	871	1,45		60,210	100
Tinggi (Kuintil 4)	64.394	98,00	1.311	2,00		65,705	100
Sangat tinggi (Kuintil 5)	66.024	95,72	2.950	4,28		68,974	100

* = bermakna signifikan secara statistik (p value < 0,05)

dari total responden dengan gambaran variabel independen diperoleh rata-rata responden berada di wilayah perkotaan yaitu sebesar 31,3 %, rata-rata umur responden berusia 30 tahun yaitu berada pada kelompok usia 26-45 tahun, rata-rata jenis kelamin responden sebesar 59,8% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan rata-rata status pernikahan responden sudah menikah sebesar 86,9%. Sementara keluhan kesehatan responden hanya sebesar 28,9%. Tingkat pendidikan responden yang tinggi yaitu hanya sebesar 25,9% dan rata-rata sosial ekonomi/pendapatan responden berada pada setiap kuintil dengan total persentase sebesar 31,64 persen.

Analisis Bivariat

Analisis bivariat untuk melihat perbedaan proporsi secara statistic variable independen (X) apakah signifikan atau tidak dengan nilai p value < 0,05 terhadap variabel dependen (Y) (Tabel 4). Tenaga kerja informal yang berada di wilayah perkotaan lebih banyak memiliki jaminan kecelakaan kerja yaitu 3,33% dibandingkan dengan tenaga informal di wilayah perdesaan sebesar 1,28% (dengan nilai p sebesar 0,0005). Persentasi kelompok umur tenaga kerja yang memiliki jaminan kecelakaan kerja berada pada usia ≥ 46 tahun yaitu sebesar 2,01 % (dengan

nilai p sebesar 0.0005).

Tenaga kerja informal perempuan lebih banyak yang memiliki kepemilikan jaminan kecelakaan kerja yaitu sebesar 2,43% dibanding laki-laki yaitu sebesar 1,58% (dengan nilai p 0,0005). Hal yang menarik dari tabel diatas bahwa persentase kepemilikan jaminan kecelakaan kerja antara tenaga kerja informal yang sudah menikah dan belum menikah adalah sama yaitu sebesar 1,92% (dengan nilai p sebesar 0,001), walaupun jumlah tenaga kerja informal yang sudah menikah lebih banyak dibandingkan dengan yang belum menikah. Sementara tingkat keluhan kesehatan pada tenaga kerja informal yang memiliki JKK yang tidak memiliki keluhan kesehatan ada sebesar 1,89% dan yang tidak memiliki keluhan sebesar 1,93%.

Tenaga kerja informal yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki persentase lebih besar atas kepemilikan jaminan kecelakaan kerja yaitu sebesar 3,61% dibandingkan dengan pekerja informal berpendidikan rendah yaitu sebesar 1,33% (dengan nilai p sebesar 0,0005). Pekerja informal yang berpendapatan sangat tinggi memiliki persentase lebih besar atas kepemilikan jaminan kecelakaan kerja yaitu sebesar 4,28% (nilai p sebesar 0,0005).

Uji Asumsi Logit

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Logit Variabel Tenaga Kerja Informal terhadap Variabel Independen

Variabel	Logit				
	Koefisien (Robust)	SE	Marginal Effect	SE	Odd Ratio
Wilayah	0.566	0.045	0.008	0.00046	1.71
Umur15-25 th	0.092	0.039			1.09
Umur 25-45 th	-0.039	0.054	0.001	0.00032	0,96
Umur +46 th	0.097	0.057			1,10
Jenis Kelamin	-0.419	0.042	-0.005	0.00039	0.66
Status Pernikahan	-0.028	0.069	-0.001	0.00064	0.93
Keluhan Kesehatan	-0.092	0.046	-0.001	0.00038	0.91
Pendidikan	0.677	0.045	0.01	0.00053	1,94
quintile_1	0.479	0.019	0.01	0.00014	0,15
quintile_2	0.329	0.084			0,21
quintile_3	1.030	0.074			0,42
quintile_4	1.309	0.072			0,56
quintil_5	0,586	0,021			1,79
Constant	-0.539	0.079			
Observation	298910				
R-Squared	0.07				

Uji asumsi logit diperoleh setelah estimasi *maximum likelihood* dilakukan maka dihasilkan pemodelan sebagai berikut:

$$P(\text{Kepemilikan JKK}=1|X) = -0,546 + 0,566\text{wilayah} + 0,092\text{umur } 15-25^{\text{th}} - 0,039\text{umur } 26-45^{\text{th}} + 0,097\text{umur } 46^{\text{th}} - 0,419\text{jeniskelamin} - 0,082\text{statuspernikahan} - 0,092\text{keluhankesehatan} + 0,677\text{pendidikan} + 0,15\text{quintil1} + 0,21\text{quintil2} + 0,42\text{quintil3} + 0,56\text{quintil4}$$

Hasil uji asumsi Logit dari persamaan diatas menunjukkan bahwa:

1. Tenaga kerja informal yang tinggal di wilayah perkotaan akan berpeluang memiliki JKK sebesar 56,6% dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan.
2. Tenaga kerja informal pada kelompok umur 25-45th maka akan berpeluang menurunkan kepemilikan JKK sebesar 3,9 %.
3. Jenis kelamin laki-laki pada tenaga kerja informal berpeluang menurunkan kepemilikan JKK sebesar 41,9%.
4. Status menikah pada tenaga kerja informal berpeluang menurunkan kepemilikan JKK sebesar 8,2%
5. Tidak adanya keluhan kesehatan pada tenaga kerja informal berpeluang menurunkan kepemilikan JKK sebesar 9,2%
6. Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja informal akan berpeluang meningkatkan kepemilikan JKK sebesar 67,7%
7. Tenaga kerja informal pada quintil 4 lebih tinggi akan berpeluang meningkatkan kepemilikan JKK sebesar 56%.

Berdasarkan hasil Ods ratio diatas dapat terlihat bahwa tenaga kerja informal yang berada di wilayah perkotaan akan berpeluang memiliki JKK sebesar 1,71 kali dari yang tinggal di wilayah perdesaan. Sementara untuk kelompok umur (tabel 6) yang berada pada ≥ 46 tahun akan berpeluang memiliki JKK sebesar 1,10 kali lebih tinggi daripada kelompok umur 15-25 tahun dan 26-45 tahun. Dari jenis kelamin terlihat bahwa perempuan akan berpeluang sebesar 0,66 kali lebih besar untuk memiliki JKK dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan hasil ods rasio untuk status pernikahan menunjukkan bahwa tenaga kerja yang menikah berpeluang sebesar 0,93 kali lebih besar dari pada tenaga kerja yang tidak menikah untuk memiliki JKK. Tenaga kerja

yang memiliki keluhan kesehatan akan berpeluang untuk memiliki JKK sebesar 0,91 kali dari pada tenaga kerja informal yang tidak memiliki keluhan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja informal akan semakin berpeluang memiliki JKK yaitu sebesar 1,94 kali lebih tinggi dari pada tenaga kerja informal yang berpendidikan rendah.

Demikian juga dengan tingkat pendapatan tenaga kerja informal yang sangat tinggi akan berpeluang memiliki JKK sebesar 0,56 kali lebih tinggi dari pada tenaga kerja dengan penghasilan dibawahnya. Hasil uji asumsi logit, pada uji klasifikasi menunjukkan bahwa model dapat diklasifikasikan dengan benar (68,28%). Dari hasil uji Hosmer-Lemeshow diketahui bahwa Prob > chi2 sebesar 0,0959 (H_0 diterima), sehingga model tersebut dapat menjelaskan variabel dependen (Kepemilikan JKK).

Pembahasan

Tenaga kerja informal sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan. Secara signifikan variabel ini berpengaruh terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja. Hal ini sesuai dengan hasil uji dimana angka tenaga kerja informal yang lebih sedikit di perkotaan tetapi memiliki jumlah kepemilikan JKK yang lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena rendahnya akses informasi di daerah perdesaan serta rendahnya pengetahuan tenaga kerja informal terkait jaminan kecelakaan kerja. Hal ini dapat terlihat dari hasil uji variabel pendidikan dimana dalam penelitian ini sebagian besar dari tenaga kerja informal memiliki pendidikan rendah yaitu sebesar 74,02% dari total responden. Menurut Notoadmodjo (2003) menjelaskan bahwa akses pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat dicapai oleh masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi dan perbedaan bahasa. Penelitian Oktora (2016) menjelaskan bahwa akses informasi mengenai asuransi kesehatan yang diperoleh melalui media cetak dan iklan sangat membantu penyebaran informasi asuransi kesehatan.

Secara jumlah tenaga kerja informal tidak terlalu jauh jumlahnya pada kelompok umur 26-45 tahun dengan usia 46 tahun keatas, dan secara kepemilikan jaminan kecelakaan kerja persentase kelompok usia 46 tahun (43,86%) keatas dan usia 26-45 tahun (45,17%) juga tidak terlalu berbeda bila dibandingkan dengan usia 15-25 tahun (10,97%). Secara keseluruhan jumlah kepemilikan

JKK meningkat seiring bertambahnya usia tenaga kerja informal Artinya semakin tinggi usia tenaga kerja informal maka kecenderungan untuk memiliki jaminan kecelakaan kerja akan semakin tinggi. Penelitian lain menyebutkan persentase kelompok pekerja informal cenderung meningkat seiring bertambahnya usia (Noeraini, 2016).

Secara total jumlah tenaga kerja informal dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Tetapi apabila dilihat dari status kepemilikan jaminan kecelakaan kerja dalam penelitian ini jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dilihat dari angka harapan hidup, laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Tetapi masalah kesehatan pada kelompok perempuan lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki, mengingat jaminan kecelakaan kerja memiliki santunan pelayanan kesehatan juga. Hal ini yang mungkin mempengaruhi kondisi tersebut dan sejalan dengan penelitian Baros (2015) yang menghasilkan penelitian terkait kepemilikan jaminan kesehatan pada perempuan cenderung lebih besar dibandingkan laki-laki.

Secara model ekonometri status pernikahan memberikan pengaruh negatif terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja. Artinya setiap penambahan status tenaga kerja informal yang menikah akan mengurangi angka kepemilikan jaminan kecelakaan kerja. Hal ini dimungkinkan karena semakin bertambahnya kebutuhan dari tenaga kerja informal sehingga memiliki kecenderungan untuk tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja meskipun dalam penelitian ini secara persentase tenaga kerja informal yang menikah dengan yang tidak menikah dalam hal kepemilikan jaminan kecelakaan kerja itu sama. Sebagaimana penelitian lain menyatakan bahwa penduduk yang belum pernah menikah akan lebih sedikit memiliki jaminan kesehatan dibandingkan dengan penduduk yang sudah pernah menikah (Littik, 2007). Secara keseluruhan dari tenaga kerja sektor informal 71 % menyatakan tidak ada keluhan kesehatan dalam 1 bulan terakhir dan secara statistik tidak bermakna terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa keluhan kesehatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jaminan. Hal ini bisa saja terjadi karena keterbatasan penelitian dimana tidak ditemukannya secara detail jenis keluhan kesehatan terutama kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

dalam data yang dipakai sehingga secara statistik, variabel ini tidak bermakna.

Sebagian besar pendidikan tenaga kerja informal pada penelitian ini berada pada tingkat pendidikan rendah. Variabel ini secara statistik bermakna terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja dan berdasarkan model ekonometri bernilai positif. Artinya kepemilikan jaminan kecelakaan kerja ini bergantung terhadap tingkat pendidikan atau tinggi rendahnya pengetahuan dari tenaga kerja informal. Secara keseluruhan jumlah kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia pada pekerja sektor informal sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab kondisi tersebut. Hal ini dapat juga terlihat dari proporsi tenaga kerja informal yang memiliki JKK sebagian besar berpendidikan tinggi. Penelitian serupa dilakukan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki proporsi terbesar untuk memiliki jaminan sosial. Menurut Dartanto et.al (2016) disebutkan bahwa alasan utama mengapa sektor informal tidak mendaftarkan diri dalam suatu jaminan salah satunya adalah karena ketidaktahuan tentang adanya jaminan.

Sosial ekonomi/pendapatan pada tenaga kerja informal secara statistik bermakna terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja. Sebagian besar tenaga kerja informal dalam penelitian ini berada pada kategori pendapatan dengan tingkat menengah. Sehingga ini menjawab rendahnya kepemilikan JKK di Indonesia karena terkait dengan pembayaran iuran jaminan. Apabila dilihat dari kepemilikan jaminan kecelakaan pada variabel sosial ekonomi, tenaga kerja informal yang memiliki jaminan kecelakaan kerja terbesar berada pada tingkat pendapatan yang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan diatas bahwa pendapatan sangat berpengaruh terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja. Ini membuktikan bahwa pentingnya pendapatan dalam hal kepemilikan jaminan. Hasil penelitian Baros (2015) dalam penelitiannya terkait jaminan kesehatan menyebutkan bahwa pendidikan rendah maupun tinggi, jika memiliki pendapatan yang tinggi akan mempunyai presentase yang besar dalam memiliki jaminan kesehatan. Diperkuat lagi dengan penelitian Hernandez 1999 bahwa pendidikan dan pendapatan adalah determinan yang penting baik dalam permintaan pelayanan kesehatan maupun keputusan untuk memiliki jaminan kesehatan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat enam variabel yang berpengaruh terhadap kepemilikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada tenaga kerja sektor informal yaitu wilayah sebesar 54,34% ($p=0,0005$), umur sebesar 46,58% ($p=0,0005$), jenis kelamin sebesar 59,80% ($p=0,0005$), status pernikahan sebesar 86,92% ($p=0,001$), pendidikan sebesar 74,02% ($p=0,0005$), dan sosial ekonomi/pendapatan sebesar 51,43% ($p=0,0005$). Dengan model ekonometri diketahui faktor yang paling berpengaruh terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja sektor informal yaitu karakteristik tenaga kerja informal terdiri dari pendidikan (OR 1,94) dan Umur (OR 1,09), wilayah (OR 1,71) serta pendapatan (OR 1,79). Dari hasil penelitian diatas dapat disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan pemerataan akses informasi terkait jaminan kecelakaan kerja, mempertimbangkan penghasilan/upah dari tenaga kerja sektor informal terkait kemampuan membayar iuran serta pemerataan jaminan sosial dimasyarakat khususnya sektor informal.

Daftar Pustaka

- Baros, W A. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan: Analisa data susenas 2013*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI. 4 (1).
- Dartanto et.al, 2016. *Participation of informal sector workers in Indonesia's National Health Insurance System*. Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE). 33 (3): 317-342.
- Darimont, B., Yanyuan, C. 2005. *Occupational accident insurance reform and legislation in China*. International social security review. 58(1)
- Duric, Predrag, O'May, Fiona, dan Diaconu, Karin., 2018. *Informal work-related injuries: a one year prospective study in a rural community in Serbia*. International Journal of Injury Control and Safety Promotion.
- Hernandez, Vera A.M, 1999. *Duplicate Covarege and Demand for Health Care: The Case of Catalonia*. Health Economics 8. Wiley Online Library-Economics of Health Care Systems. Jurnal of Health Economics. 8 (7).
- Kaseke, Edwin., Ncube, M. 2003. *Work Accident Insurance and Prevention in Southern Africa: The case of Zimbabwe*. International Social Security Review. 56(3-4)
- Kemkes. 2015. Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (Situsi Kesehatan Kerja). Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- Littik, S. 2007. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan asuransi di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal MKM. 3(2).
- Noeraini, Astrid. A. 2015. *Ekonomi informal di Indonesia, Suatu tinjauan pustaka*. Jurnal Jp Unsoed Journal proceeding.
- Notoadmodjo, S, 2003. Ilmu kesehatan masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktora. 2016. *Determinan willingness to pay iuran jaminan kesehatan pada pekerja sektor informal (pengemudi ojek pangkalan) kota depok tahun 2016*. Perpustakaan FKM UI, 2016.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang sistem jaminan sosial nasional no. 40 Tahun 2004.
- Taufiq, N, 2017. Pengaruh dinamika sektor pekerjaan terhadap dinamika kemiskinan di Indonesia: *The effect of employment dynamics in Indonesia*. November 2018 < website e-journal kemsos.go.id, 2017>.
- Utama, Gwendolyn Ingrid. 2015. *Kesempatan Jaminan Sosial bagi pekerja Sektor Usaha- Informal*. Diakses pada: Oktober 2018 <<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/391/Kesempatan-Perlindungan-Jaminan-Sosial-bagi-Pekerja-Sektor-Usaha-Informal.html>>